

PEMKOT TERIMA SERTIPIKAT TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN

Miliki Kepastian Hukum, Beri Kemanfaatan bagi Masyarakat

YOGYA (KR) - Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) atau Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana Kota Yogya intensif melakukan penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten. Setelah memiliki kepastian hukum dengan terbitnya sertipikat maka hal tersebut semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan tanah kasultanan dan kadipaten bukan hanya sekadar aset, tetapi juga merupakan simbol dari kerifan lokal kekayaan budaya, sejarah, dan jati diri warga masyarakat. "Serah terima sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten ini merupakan langkah konkret dalam rangka kita bersama memberikan pengakuan dan penguatan hak atas tanah yang merupakan bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Yogya," ungkapnya dalam serah terima secara simbolis sertipikat tanah ka-

sultanan dan kadipaten di SM Tower, Rabu (21/8). Sertipikat yang sudah dalam bentuk elektronik tersebut diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogya kepada Pemkot Yogya. Kegiatan itu sekaligus untuk memperingati 12 tahun Undang-undang Keistimewaan (UUK) serta didanai melalui dana keistimewaan.

Sugeng menambahkan pemberian sertipikat dari BPN adalah upaya untuk memberikan hak hukum bukti kepemilikan tanah dan selanjutnya guna meningkatkan harkat serta peman-

faatan tanah demi kemakmuran rakyat. "Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur Sri Hamengku Buwono X, filosofi 'manunggaling kawula lan Gusti', mengajarkan kita untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah yang humanis berbasis pada prinsip-prinsip 'manunggaling pamong lan wargo'," imbuhnya.

Oleh karena itu dengan tujuan tersebut serah terima sertipikat tanah harus diregulasi dan dimanfaatkan untuk akselerasi proses investasi. Kepala BPN Kota Yogya Rudi Prihantoro, menjelaskan tahun ini pihaknya menyerahkan 48 sertipikat

tanah kasultanan dan kadipaten. Seluruhnya sudah dipastikan 'clear and clean' karena telah melalui serangkaian tahapan yang dilakukan oleh Dispetaru Kota Yogya mulai inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan hingga pendaftaran ke BPN Kota Yogya. "Dengan terbitnya sertipikat ini maka memiliki kepastian hukum. Tidak ada masalah di lapangan maupun yuridisnya. Proses pemanfaatannya pun menyesuaikan aturan," tandasnya.

Sementara Kepala Dispetaru Kota Yogya Wahyu Handoyo Hardjono Putro, menguraikan sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten yang diserahkan kali ini merupakan hasil penatausahaan tahun 2023 lalu. Sejak pendataan tahun 2017 sampai saat ini, terdapat 446 bidang tanah kasultanan dan kadipaten di Kota Yogya yang berhasil diter-



Serah terima sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten oleh BPN Kota Yogya kepada Pemkot Yogya.

bitkan sertipikat. Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah maka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif serta terwujudnya kesejahteraan bagi warga Kota Yogya.

Bidang tanah kasultanan dan kadipaten yang telah disertipikat itu antara lain

telah dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Di antaranya seperti balai serbaguna, balai rukun warga, pemakaman, blok hunian, taman, bangunan penunjang ekonomi dan sebagainya. Beberapa contoh yang mampu menjadi pembangkit ekonomi warga ialah Lembah

Code di Prawirodirjan yang dulunya kawasan kumuh kini menjadi fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat. Begitu juga Bendung Lepen Giwangan serta kawasan bantaran sungai yang sudah ditata melalui program penataan kawasan kumuh. **(Dhi)-f**

Memperoleh Informasi Adalah Hak Masyarakat

YOGYA (KR) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY memiliki tugas memberikan informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak untuk bisa menjalankan tugas edukatif tersebut.

"Saya kira diperlukan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait kualitas informasi yang perlu diserap. Mendapatkan informasi memang menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Tapi kualitas informasi inilah yang wajib diperhatikan oleh KPID. Untuk itu tugas KPID adalah memastikan edukasi ke masyarakat agar bagaimana membuat mereka bertanggungjawab pula atas informasi yang dimaksud," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X saat menerima kunjungan KPID DIY, di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Rabu (21/8).

Ketua KPID DIY, Hazwan Iskandar Jaya bersama tim berkunjung untuk memberikan laporan kegiatan yang telah dan akan dilakukan pada periode yang akan



Paku Alam X saat menerima Ketua KPID DIY beserta jajaran di Gedhong Pareanom Kompleks Kepatihan.

datang. Paku Alam X mengatakan, perlu diadakan pembinaan pada masyarakat oleh KPID DIY agar bisa ikut andil dan terlibat dalam proses mempertanggungjawabkan persebaran informasi. Adapun bentuknya bisa dilakukan dengan pendekatan melalui event-event yang menarik agar pesan pada masyarakat sampai dengan baik.

"Bagaimana masyarakat sebagai subjek. KPID wajib bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hazwan Iskandar Jaya menyebut, tugas dan fungsi KPID DIY sebagai pembina dan pengawas konten

siaran radio dan televisi DIY, memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, KPID DIY harus mengusahakan terciptanya suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan informasi yang demokratis, serta keteraturan berdasarkan asas persamaan dan keadilan.

"Beliau sangat support, memberikan banyak arahan juga untuk berkolaborasi dengan pihak lain sehingga kita tidak bekerja sendirian. Dengan begitu fungsi-fungsi kita bisa berperan sesuai dengan wewenangnya," Hazwan. **(Ria/Feb)-f**

Tim Peneliti FH UJB Gelar FGD Kajian Yuridis Penetapan Kasultanan dan Kadipaten

YOGYA (KR) - Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Janabadra (FH UJB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Kajian Yuridis Penetapan Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah di DIY' di Top Malioboro Hotel Yogyakarta, Kamis (15/8).

FGD ini sebagai kelanjutan kegiatan penelitian sebelumnya dari program penelitian Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tahun 2024. Tim peneliti FH UJB terdiri dari Erna Sri Wibawanti SH MHum, Dr R Murjiyanto SH MKn dan Wiwin Budi Pratiwi SH MHum.

FGD menghadirkan beberapa narasumber yaitu dari Eti Yuli Hartati SH dari Kanwil ATR/BPN DIY, Ajie Mardana ST dari Dispetaru DIY, Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum dari Panitikismo Kasultanan, Koenjtjoro Adi T AMd dari Panitikismo Kadipaten dan Rio Kustianto Wironegoro SH MHum dari Notaris-PPAT. Adapun peserta FGD terdiri akademisi, perwakilan kantor ATR/BPN kabupaten/kota, perbank dan Notaris-PPAT. "FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh tam-



Para pembicara dan peserta Focus Group Discussion.

bahan bahan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian," kata Erna Sri Wibawanti, salah satu peneliti FH UJB.

Menurut Erna, pada penelitian sebelumnya data atau keterangan terkait inventarisasi dan pendataan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten, maupun rekomendasi dan pemberian Serat Kekancingan yang diperoleh masih sangat terbatas. "Diharapkan pada penelitian tahun 2024 ini dapat memperoleh bahan data dan keterangan yang lebih banyak, salah satunya dilakukan melalui kegiatan FGD ini," ujarnya

Murjiyanto menambahkan, di penelitian tahun ke-2 ini memfokuskan pada persyaratan dan prosedur pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai di atas Tanah

Kasultanan atau Kadipaten, serta peralihan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Disamping itu juga terkait perlindungan hukum kreditur dalam hal terjadi kredit bermasalah atau macet. Wiwin Budi Pratiwi mengatakan, permasalahan ini perlu dilakukan diskusi secara terus menerus dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari informasi yang tidak jelas dan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda yang berujung pada keresahan di tengah masyarakat.

"Dengan pemahaman bersama diharapkan proses pensertifikatan tanah-tanah Kasultanan atau Kadipaten dapat berjalan lancar, dan bagi masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum," ujarnya. **(Dev)-f**

297 KELOMPOK MASUK DALAM PENYEDIA JASA

Kemantren Jetis Paling Tinggi Akses E-Nglarisi

YOGYA (KR) - Program Gandeng Gendong kuliner melalui aplikasi atau sistem e-Nglarisi akan terus dikembangkan. Pada tahun ini sejak Januari hingga pertengahan Agustus, Kemantren Jetis menjadi organisasi perangan daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogya yang tertinggi dalam mengakses e-Nglarisi.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperinkop UKM) Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto Raharjo, menjelaskan aplikasi e-Nglarisi digunakan untuk pemesanan jamuan makan minum bagi kalangan OPD guna membantu ekonomi masyarakat yang tergabung sebagai penyedia jasa.

"E-Nglarisi sudah berjalan lima tahun, yang saat ini akan kami lakukan pengembangan dari segi teknis aplikasinya. Kemudian juga pembinaan bagi kelompok Gandeng Gendong serta kurasi bagi Usaha Kecil Mikro (UMK)

sebagai penyedia jasa," jelasnya, Rabu (21/8).

Aplikasi tersebut juga sudah tersaji dalam Jogja Smart Service (JSS) sehingga memudahkan OPD dalam melakukan pemesanan jamuan makan minum rapat maupun jamuan tamu. Kemantren Jetis mencatatkan transaksi tertinggi mencapai Rp 224,9 juta. Sedangkan kelompok penyedia yang paling banyak menerima pesanan ialah Kencana Boga dari Pakuncen dengan total nilai Rp 154,2 juta. Semakin tinggi transaksi yang dilakukan oleh OPD maka manfaat yang akan diterima oleh masyarakat juga semakin besar. Hal ini karena setiap kelompok yang tergabung sebagai penyedia jasa sudah menjalani kurasi, serta unsur anggotanya merupakan keluarga pra sejahtera yang perlu diberdayakan.

Tri Karyadi menambahkan hingga saat ini terdapat 297 kelompok Gandeng Gendong yang masuk dalam daf-

tar penyedia jasa di s-Nglarisi. "Namun memang belum semuanya aktif, ada beberapa yang masih dalam masa pendampingan seperti dari sisi kualitas produk, legalitas, kemas dan lainnya. Kemudian ada juga yang masuk kategori sudah siap menerima pesanan," imbuhnya.

Sementara Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, mengatakan pengembangan e-Nglarisi sebagai agregator kelompok Gandeng Gendong dapat diperluas dengan mengeksplorasi pasar di luar konsumen OPD di lingkungan Pemkot Yogya. "Ketika sudah berjalan lima tahun maka sudah saatnya untuk naik kelas. Dalam artian kelompok Gandeng Gendong yang saat ini menjadi penyedia jasa di e-Nglarisi bisa dibukakan jalan untuk ke pasar yang lebih luas. Pemkot sebagai penjaminannya terlebih dahulu melakukan survei apa yang dibutuhkan pasar," urainya. **(Dhi)-f**

KECENDERUNGAN TERUS MENINGKAT

Masyarakat Harus Mewaspada Penyakit Tak Menular

YOGYA (KR) - Penyakit tidak menular harus menjadi kewaspadaan masyarakat lantaran kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di wilayah bahkan turut dilibatkan dalam mende- tekstasi hingga melayani pasien penyakit tidak menular, khususnya diabetes meli- tus.

Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Yogya Iva Kusdyarini, menjelaskan pihaknya tidak pernah berhenti dalam mengajak serta memberikan edukasi agar menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat atau gernas. "Dalam gernas itu kami juga kampanyekan 'Cerdik' atau cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Langkah itu bisa membantu masyarakat agar terhindar

dari penyakit tidak menular terutama diabetes mellitus," ungkapnya, Senin (19/8).

Angka penderita diabetes mellitus di seluruh dunia saat ini diperkirakan sebanyak 285 juta orang. Penderitaan tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 438 juta orang pada tahun 2030. Selain itu, dari hasil Suvei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan masih tingginya prevalensi diabetes mellitus yakni 11,7 persen. Hasil itu berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah dengan urutan tiga provinsi prevalensi diabetes mellitus tertinggi berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2023 adalah DKI Jakarta, disusu DIY dan Kalimantan Timur.

Iva menambahkan, hingga saat ini penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogya pada Juli 2024 sebanyak 13.985 pasien. Jumlah tersebut

juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan kasus diabetes mellitus sebagai salah satu penyakit tidak menular lantaran masyarakat sering mengonsumsi makanan berlebih dan minuman yang banyak mengandung gula. "Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular. Sehingga gernas atau perilaku hidup bersih dan sehat melalui 'Cerdik' menjadi salah satu acuan agar badan selalu sehat dengan makan-makanan yang bergizi," ujarnya.

Sementara faskes di wilayah turut berperan aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular. Melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), keterlibatan faskes di wilayah dapat semakin intensif dalam memberikan layanan. Salah satu faskes di wilayah yang menerapkan ILP ialah Puskesmas Mantrijeron. **(Dhi)-f**

Gumregah Merti Uwuh di Teras Malioboro 1

YOGYA (KR) - Memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan Peringatan 12 Tahun UU Keistimewaan DIY, keluarga pedagang Teras Malioboro 1 dalam tradisi budaya Selo Wagen, menggelar kegiatan kebersihan bersama bertajuk 'Gumregah Merti Uwuh Malioboro', Selasa (20/8). Juga dilaksanakan cek kesehatan gratis, donor darah PMI, kompetisi pengambilan sampah, door-prize, penghargaan sekuriti dan cleaning service terbaik tahunan dan hiburan spesial.

"Bekerjasama dengan Disperindag Kota Yogyakarta dan Bulog, digelar juga pasar murah untuk para tenant, sehingga tenant pun dilain sisi juga dapat berbelanja bahan pokok dengan harga dibawah pasar. Harapannya kegiatan Gumregah Merti Uwuh Malioboro menjadikan semakin hidup dalam kebersamaan, kekompakan dan persaudaraan yang kuat

membangun kawasan wisata Malioboro semakin apik dan bertaraf internasional," tutur Paniradya Pati DIY Aris Eko Nugroho SP MSI dalam sambutannya.

Disebutkan, sebelumnya para pedagang setiap Selasa Wage rutin bersih-bersih. "Sudah menjadi salah satu

agenda rutin tahunan dalam skala besar selain rutinitas," jelasnya. Area yang dibersihkan meliputi Teras Malioboro 1, Kawasan Malioboro dari perempatan Suryatmajan (Kepatihan) sampai dengan area Titik 0 Km Benteng Vrendenburg. Sedang Kepala Dinas Ko-



Turut Berdukacita

Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Gadjah Mada menyatakan berdukacita sedalam-dalamnya atas berpulangnyanya

Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
(Dekan Periode 2016-2021 Fakultas Hukum)

meninggal dunia pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB di Rumah Sakit Akademik UGM.

Jenazah disemayamkan di Balai UGM pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB untuk selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar UGM Sawit Sari.

Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Rektor

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp. OG(K), Ph.D.



Tempat, Tanggal Lahir:
Sukoharjo, 15 Februari 1964